

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta; Kencana, 2009.
- Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta: 1986.
- Afan Gaffar., *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan*, Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP. 2007.
- Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-14, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, cetakan ke-7, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2008.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta: 2007.
- Sjachran Basah. *Ilmu Negara*, Cetakan ke-9, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2011.
- Samsul Wahidin, *Konseptualisasi Dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Trubus Rahardiansyah P. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2014.

B. Perundang - Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Tahun 2014.

C. Artikel

Muhammad Abdillah Abidin. *“Fungsi Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Pembentukan Undang-undang”*, Makassar.

M Izzi Nourozzaman, *“Hak Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia”*, Mataram.

Rida Farida. *“Mekanisme Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat”*, Jawa Barat.

Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1), (edisi revisi), Jakarta, 2019: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.